



**Arsip Nasional
Republik Indonesia**

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

**Jakarta
2015**



Pengantar Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2014 dan merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN) Tahun 2010 - 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014. Selain itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI ini juga berdasarkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan janji kinerja di Tahun 2014.

Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa indikator kinerja tertentu yang tidak tercapai.

Hasil analisis dan evaluasi Laporan Kinerja ANRI Tahun 2014 ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran dari seluruh komponen di lingkungan ANRI dan institusi pemerintah pusat maupun daerah dalam peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja di tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja ANRI dan bidang kearsipan secara nasional dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia

Mustari Irawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

Bab 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
Bab 2	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	3
	A. Rencana Strategis	3
	B. Penetapan Kinerja	5
Bab 3	AKUNTABILITAS KINERJA	6
	A. Capaian Kinerja ANRI Tahun 2014	6
	B. Akuntabilitas Keuangan	23
Bab 4	PENUTUP	24

Lampiran

Lampiran 1	: Penetapan Kinerja
Lampiran 2	: Pengukuran/Capaian Kinerja
Lampiran 3	: Implementasi SIKD-TIK
Lampiran 4	: Instansi yang Telah melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
Lampiran 5	: Persetujuan JRA Tahun 2014
Lampiran 6	: Daftar Instansi Yang Menyerahkan Arsip Statis
Lampiran 7	: Persetujuan Pemusnahan Arsip
Lampiran 8	: Pengukuran Pencapaian sasaran
Lampiran 9	: Pengukuran Kinerja Kegiatan
Lampiran 10	: Pengukuran Efisiensi Kegiatan



DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
1	Perkembangan Jumlah Instansi Yang menerapkan SIKD-TIK	7
2	Instansi yang Telah Mendapatkan Persetujuan JRA sampai 2014	9
3	Perbandingan Penyelamatan Arsip Statis	11
4	Perbandingan Persetujuan Pemusnahan Arsip	13
5	Perbandingan Jumlah Simpul Jaringan	16
6	Perbandingan Evaluasi Laporan AKIP	20
7	Tabel Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	21



Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar Eksekutif

Semangat akan perubahan adalah hal mendasar yang melandasi dinamika dan perkembangan di lingkungan ANRI dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 - 2014. Hal ini diikuti dengan adanya perubahan struktur organisasi ANRI guna mempercepat terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2014 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis ANRI yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Adapun capaian kinerja ANRI tahun 2014 adalah sebesar 108% dengan perhitungan bahwa sebanyak 8 indikator capaian kategori "baik". Pada tahun 2014, dari 8 (delapan) indikator yang ada di ANRI, seluruh kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 0 sampai dengan 1.

Keberhasilan dalam pembinaan kearsipan nasional sangat ditentukan oleh semangat memegang teguh komitmen, keterlibatan semua pihak serta dukungan dari segenap unsur baik pemerintah pusat maupun daerah,

BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan seluruh masyarakat kearsipan.

Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar **Rp.103.911.372.237,-** (seratus tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 88.78% dari pagu anggaran sebesar **Rp.117.043.549.000,-** (seratus tujuh belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran Tahun 2013 terdapat peningkatan penyerapan anggaran dimana pada Tahun 2013 penyerapan anggaran sebesar **81.19%**, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penyerapan anggaran sebesar **88.78%**. Terkait penyerapan anggaran pada tahun 2014 sebesar 88.78% disebabkan oleh:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari perjalanan dinas antara lain karena adanya perbedaan tiket perjalanan keluar negeri;
2. Tidak terpenuhinya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Sisa anggaran pada belanja gaji sehingga berakibat anggaran

tersebut dikembalikan kepada kas negara.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh ANRI antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*.
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi kearsipan.
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional,
5. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.





A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan merupakan pilar utama dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Oleh karena itu penyelenggaraan kearsipan secara baik dan benar harus dilaksanakan oleh setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Dalam sudut pandang hubungan antara lembaga negara disatu sisi, dengan publik di sisi lain, tertib arsip dibangun untuk menciptakan dan menambahkan nilai arsip pada kehidupan publik (*public value*). Dalam setiap hubungan yang melibatkan kedua belah pihak ini (*social transactions*), akan selalu disertai oleh terciptanya arsip yang merekam peristiwa/kejadian dari setiap aspek, diantaranya: aspek *informasional, sosial, politik, ekonomi, legal*, ataupun *kultural*. Tertib arsip terutama juga untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak dalam aspek-aspek tersebut terlindungi. Arsip, lebih dari sekedar persoalan informasi dan

legal, karena arsip terlibat dan sekaligus produk hubungan sosial. Nilai yang terkandung dalam arsip, yang paling penting bagi publik terletak pada karakter, yaitu sebagai sumber pengetahuan. Arsip sebagai sumber pengetahuanlah yang akan membuat manusia sanggup untuk melanjutkan peradabannya. Maka yang sangat penting adalah memastikan bahwa negara dan publik mempraktikkan penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Perka ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti amanah tersebut, maka ANRI harus melaksanakan tugas kearsipan secara penuh tanggung jawab, efektif dan efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Selanjutnya, Peraturan Presiden tersebut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ANRI, sebagai unsur penyelenggara negara ANRI wajib melaporkan akuntabilitas kerjanya tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja ANRI Tahun 2014. Capaian kinerja ini merupakan perbandingan dengan target yang akan dicapai yang terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi

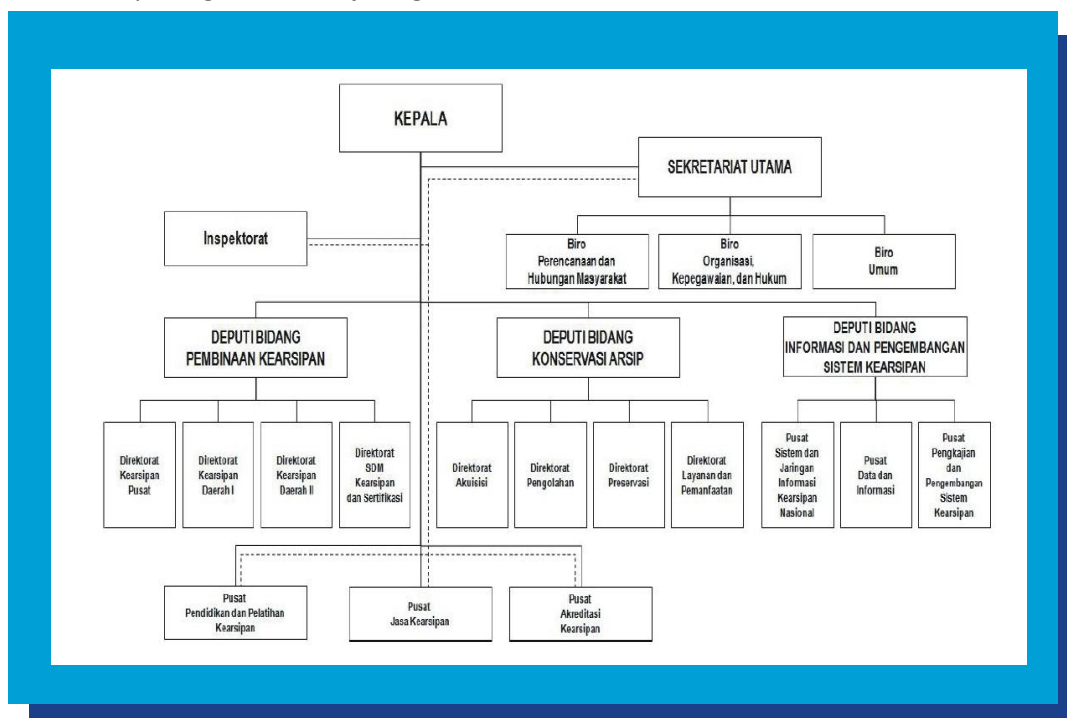
secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Tugas pokok ANRI adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana tugas dan fungsi kearsipan semakin bertambah, mengharuskan penambahan fungsi-fungsi di tubuh ANRI. Meski demikian seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, ANRI telah melakukan perampingan di beberapa unit substansi yang selama ini masih terdapat eselon IV pada unit substansi menjadi tidak ada.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Perka ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ANRI selanjutnya menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dengan bagan sebagai berikut:



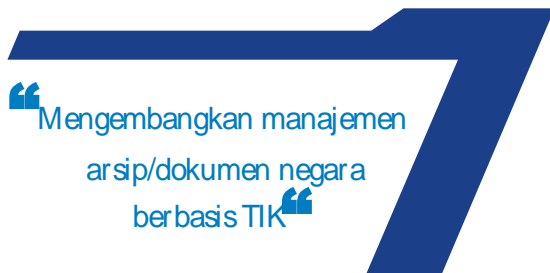


RENCANA STRATEGIS

dan PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

ANRI dalam melaksanakan tugas pembinaan kearsipan baik di pusat maupun di daerah dijiwai oleh semangat untuk melakukan reformasi di bidang kearsipan. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan sebagaimana dalam RPJMN 2010-2014 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung



tercapainya prioritas bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, khususnya pada Fokus Prioritas VI yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Berkaitan dengan pencapaian target RPJMN tahun 2010-2014, ditetapkan fokus prioritas pembangunan jangka menengah Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014 adalah **mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi**. Sejalan dengan hal itu, dalam upaya mewujudkan tercapainya fokus prioritas tersebut serta

dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, peranan ANRI terlihat sangat nyata khususnya dalam pengembangan sistem ketatalaksanaan yang diwujudkan dalam pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government). Dengan demikian ANRI harus memiliki visi dan misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Selanjutnya visi dan misi dijabarkan dalam tujuan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis strategis. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi dan misi ANRI **“Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”**, yang mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip juga tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, ANRI menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- 2) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
- 3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
- 4) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

- Indonesia; dan
- 5) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi ANRI, maka ditetapkanlah tujuan strategis pembangunan kearsipan.



B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

ANRI pada tahun 2014 telah menetapkan Penetapan Kinerja, yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:



meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;



sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;



sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja ANRI selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.





AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2014

Pencapaian kinerja ANRI dilakukan dengan melakukan pengukuran yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja ANRI Tahun 2014 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja ANRI tahun 2014 sebesar 107% dengan perhitungan bahwa dari 8 (delapan) indikator

kinerja, sebanyak 8 (delapan) indikator dengan capaian kategori “Baik”, walaupun demikian terdapat beberapa indikator yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penghematan anggaran.

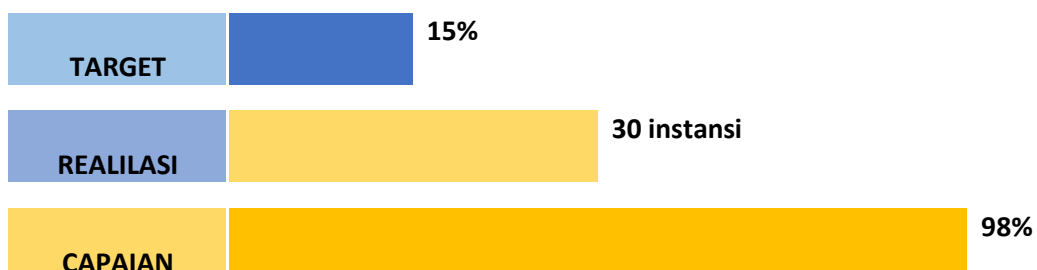
Adapun capaian kinerja ANRI Tahun 2014 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.



Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya
 Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif

Sasaran strategis ini ditempuh dengan indikator kinerja:

1. **Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis.**



Pengelolaan arsip (*archival management*) yang baik pada tingkat pencipta arsip di lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan Perguruan Tinggi Negeri adalah fondasi bagi Sistem Kearsipan Nasional.

Terkait dengan indikator ini, maka pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terpadu perlu dilaksanakan sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan

teknologi, mudah diakses, sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) pada 15 (lima belas) instansi pusat, serta di 15 (lima belas) provinsi pemerintah daerah. Berikut kami sampaikan Tabel perkembangan Jumlah Instansi Yang Menerapkan SIKD-TIK tahun 2012 – 2014.

Tabel 1
Tabel perkembangan Jumlah Instansi Yang Menerapkan SIKD-TIK

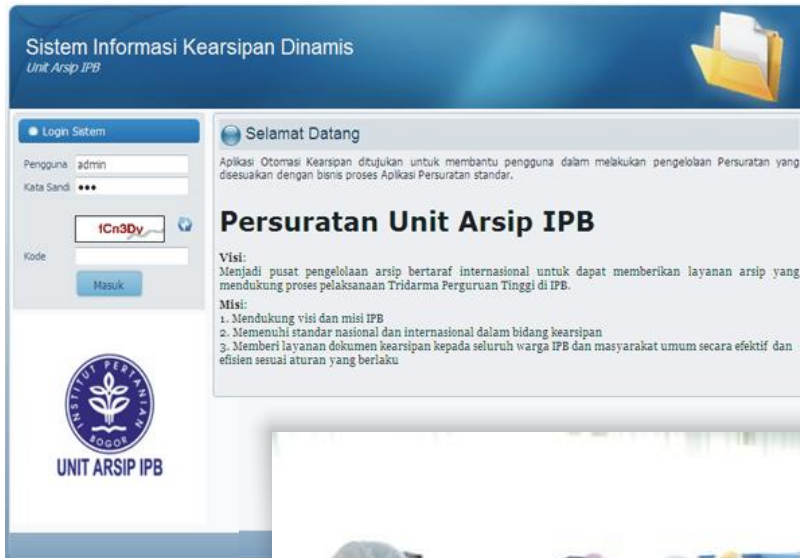
Instansi	Jumlah	Tahun							
		sd 2012	%	2013	sd 2013	%	2014	Sd 2014	%
Pusat:	420	44	11.2	27	71	16.9	15	86	3.6
Kementerian/ Lembaga	87	23	29.8	34	34	39.1	15	49	17.2
PTN	193	10	5.2	18	18	9.3	0	18	0
BUMN	140	11	7.8	19	19	13.6	0	19	0
Daerah:	541	0	0	17	17	3.1	15	42	2.8
Provinsi	33	0	0	17	17	51.5	15	32	45.5
Kab/Kota	508	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	961	47	4.9	104	104	10.4	30	246	11.86

Berdasarkan tabel diatas, apabila diambil rata-rata maka prosentase instansi yang telah menerapkan SIKD sampai dengan tahun 2014 sebesar 11.86%. Hal ini berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, termasuk telah dilakukan implementasi SIKD-TIK sebagai tindak lanjut dari pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan ANRI dengan melakukan komunikasi yang intensif pada

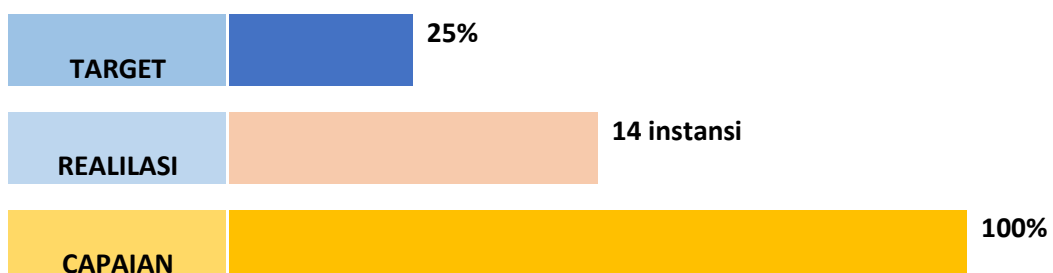
Universitas Udayana dan Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian pada indikator ini, pada tahun 2014 ANRI telah melebihi target yang semula ditetapkan yaitu dari 30 instansi menjadi 32 instansi atau sebesar 103%. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi ANRI (khususnya Kedeputan Bidang Pembinaan Kearsipan). Implementasi SIKD-TIK Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Pada 2014 pelaksanaan Implementasi SIKS berbasis TIK pada lembaga kearsipan pusat yaitu pada Lembaga

Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) tidak dilaksanakan dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran.



2. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA) serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.



Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip adalah instrumen kearsipan yang merupakan *elemen dasar dari sebuah sistem dan manajemen kearsipan* pada pencipta arsip. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan pada bidang instrumen kearsipan ini bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi sistem dan manajemen kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Pada Tahun 2014, program ini diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi serta supervisi penerapan peraturan bidang kearsipan pada pengelolaan arsip pada 14 (empat belas) instansi. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya *standar praktik kearsipan* yang dipenuhi dari penyusunan dan penerapan instrumen kearsipan tersebut

dalam sistem kearsipan instansi. Setelah dilaksanakan supervisi penyelenggaraan kearsipan nasional pada lembaga negara (Kementerian/Lembaga), instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan sebanyak 14 (empat belas) instansi atau tercapai sebesar 94 % dari 15 (lima belas) instansi yang ditargetkan. Instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai peraturan di bidang kearsipan terdapat pada lampiran 4.

Pada tahun 2014 telah diberikan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pada 52 instansi dengan jumlah JRA berdasarkan jenis informasi sebanyak 59 jenis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5.

Tabel 2
Instansi yang Telah mendapatkan Persetujuan JRA sampai dengan Tahun 2014

INSTANSI	JUMLAH	PERSETUJUAN JRA		
		Tahun 2013 (Jumlah instansi)	Tahun 2014 (Jumlah instansi)	%
Pusat:	420	131	21	36,16
Kementerian/Lembaga	87	71	19	95.40
Perguruan Tinggi	193	20	2	10.88
BUMN	140	40	-	34,29
Daerah:	541	401	31	80.04
Provinsi	33	33	4	100
Kabupaten/Kota	508	369	27	77.95
Total	961	533	52	60.56



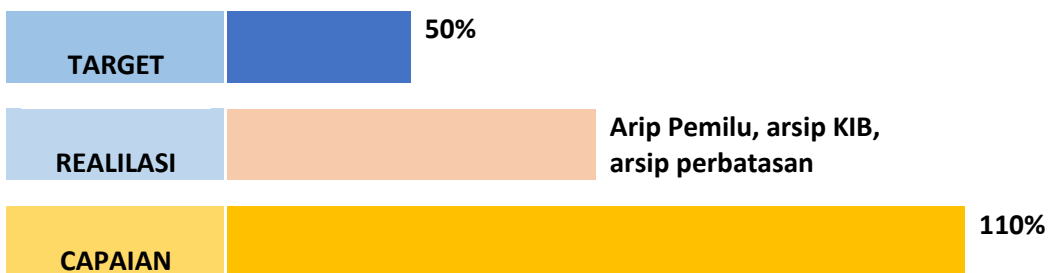
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya

Terwujudnya efektifitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik

Dalam mencapai sasaran ini, ANRI mencapainya dengan melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip statis,

dan pemberian usul rekomendasi pemusnahan arsip.

1. Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan.



Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, *outcome* dari Sistem Kearsipan Nasional (SKN) selain akan dicapai dengan pembinaan terhadap penerapan pengelolaan arsip (*archival management*) sesuai dengan peraturan kearsipan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia, juga akan dicapai melalui penyelamatan (*acquisition*), pengolahan (*arrangement and description*), pelestarian (*conservation-preservation*), akses (*access*), dan pemanfaatan arsip. Untuk memenuhi tujuan ini, ANRI menjalankan kegiatan penyelamatan arsip statis lembaga negara. Kegiatan ini dijalankan dengan melakukan penelusuran, pendataan, penilaian, dan

penarikan arsip (akuisisi arsip) instansi pemerintah baik yang ada di dalam maupun luar negeri serta untuk menambah kekayaan akan arsip statis juga dilakukan wawancara terhadap tokoh nasional/pelaku sejarah. Pada Tahun 2014, ANRI menyelamatkan arsip lembaga negara berupa arsip pemilu, arsip Kabinet Indonesia Bersatu serta arsip Perbatasan. Total arsip statis lembaga negara yang diserahkan dalam tahun 2014 sebanyak 1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat dari 27 instansi. Target yang akan dicapai sebesar 50% dari 49 instansi, sedangkan realisasi 27 instansi sehingga pencapaian melebihi target yaitu 55%. Jadi, realisasi keseluruhan penyelamatan arsip statis lembaga negara tercapai sebesar 110%. Rincian penyelamatan arsip yang dilakukan oleh ANRI tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Disamping melakukan penyelamatan arsip lembaga negara, juga melaksanakan penyelamatan arsip perusahaan,

arsip ormas/orpol, dan arsip perseorangan.

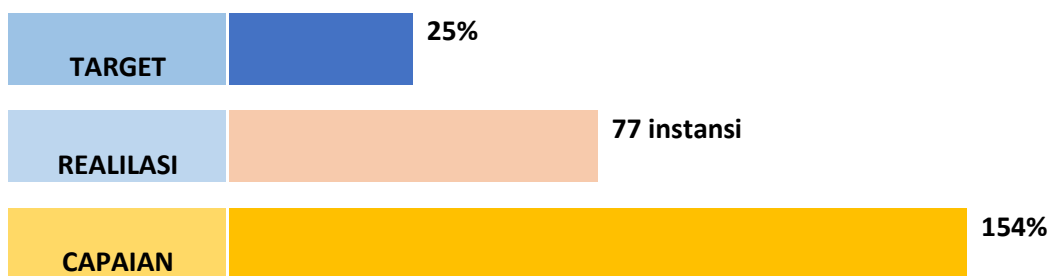
Tabel 3
Perbandingan Penyelamatan Arsip
Tahun 2013 dan 2014

NO	JENIS ARSIP	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Arsip Pemilu	652 boks, 13 berkas/bundel, 35 CD	Penilaian, pendataan arsip
2	Arsip Kabinet Indonesia Bersatu	494 boks, 3.306 lembar peta dan 14 lembar foto	27 instansi: (1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat)
3	Arsip Perbatasan	-	235 arsip kartografi (dalam bentuk softcopy);





2. Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun



Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemusnahan arsip bukanlah kebijakan yang melawan sasaran strategis penyelamatan arsip tetapi justru adalah kebijakan untuk menciptakan ruang bagi penyelamatan arsip. Pemusnahan arsip akan menjamin khasanah tetap terdiri atas arsip-arsip yang memiliki nilai berkelanjutan oleh karena kebijakan dalam koleksi arsip akan terus menyeleksi arsip untuk disimpan atau dimusnahkan secara terprogram. Tahun 2014, pada indikator ini ANRI menargetkan 25% instansi yang mendapatkan persetujuan pemusnahan

arsip. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemusnahan arsip bukanlah kebijakan yang melawan sasaran strategis penyelamatan arsip tetapi justru adalah kebijakan untuk menciptakan ruang bagi penyelamatan arsip. Pemusnahan arsip akan menjamin khasanah tetap terdiri atas arsip-arsip yang memiliki nilai berkelanjutan oleh karena kebijakan dalam koleksi arsip akan terus menyeleksi arsip untuk disimpan atau dimusnahkan secara terprogram. Pada tahun 2014 telah diberikan persetujuan pemusnahan arsip kepada

77 (tujuh puluh tujuh) lembaga negara/badan pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah. Sedangkan target yang direncanakan sebanyak 50

instansi, sehingga diperoleh prosentase realisasi sebanyak 154%.

Tabel 4
Perbandingan Persetujuan Pemusnahan Arsip
Tahun 2013 dan 2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013	TAHUN 2014
Persetujuan Pemusnahan Arsip	31 instansi	77 Instansi



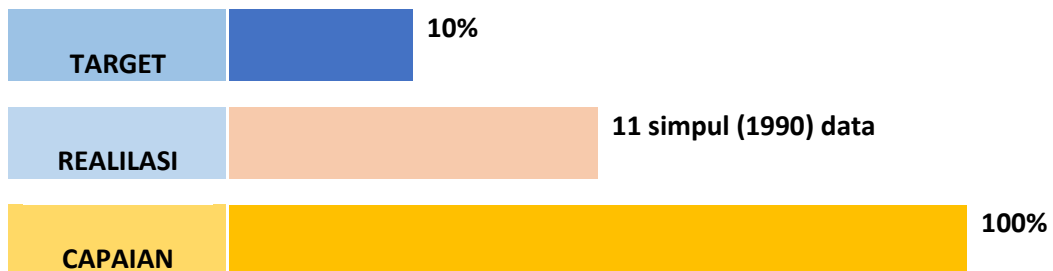


Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis TIK secara komprehensif dan terpadu

Terwujudnya hasil kajian yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan

Dalam mencapai sasaran ini, ANRI mencapainya dengan melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan NSPK Kearsipan, pengkajian dan pengembangan sistem dan jaringan informasi kearsipan serta menyelenggarakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Dari keseluruhan kegiatan ini ANRI menargetkan 10% dari data informasi

arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah *terupload* dalam JIKN.



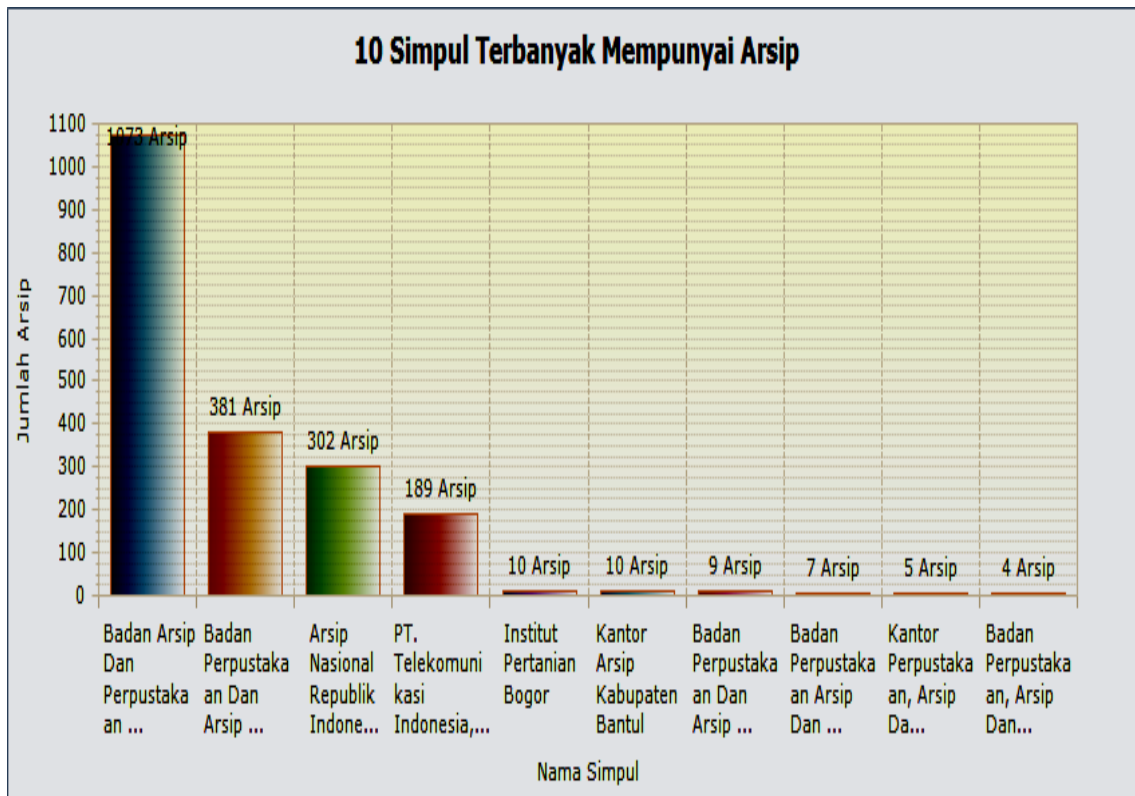
Dalam kegiatan pengkajian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan NSPK, ANRI telah menyusun sebanyak 5 (lima) NSPK yaitu: Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Tahap III, Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Tahap II, Pedoman Retensi Arsip Sektor Polhukam Tahap II, Pedoman Autentikasi Arsip Statis, Pedoman pengelolaan Arsip Terjaga serta terbitnya Jurnal Kearsipan volume 9 (sembilan) dengan 7 (tujuh) artikel yang bertajuk: Menjadikan ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Kelas Dunia Melalui Kinerja Pengelolaan Arsip Statis; Peluang Arsiparis menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Konteks, Konteks, Konteks!. Aspek Fundamental dalam Proses Pengelolaan Arsip Foto; Postmodernisme dalam Kearsipan; Skandal Donner (1900–1902): Sebuah Gerakan Politik Arsip; Akses terhadap Arsip Statis Kategori Tertutup: Studi Terhadap Arsip Peristiwa G30S/PKI yang Tersimpan di ANRI; Desain Bahan Ajar Cetak Berbasis Praktik Kualifikasi Program Diploma pada Perguruan Tinggi Jarak Jauh: Studi Kasus Desain Modul Berbasis Praktik pada Prodi Diploma IV Kearsipan.

Sedangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan jaringan informasi kearsipan telah dihasilkan NSPK sebanyak 2 (dua) NSPK yaitu: Petunjuk

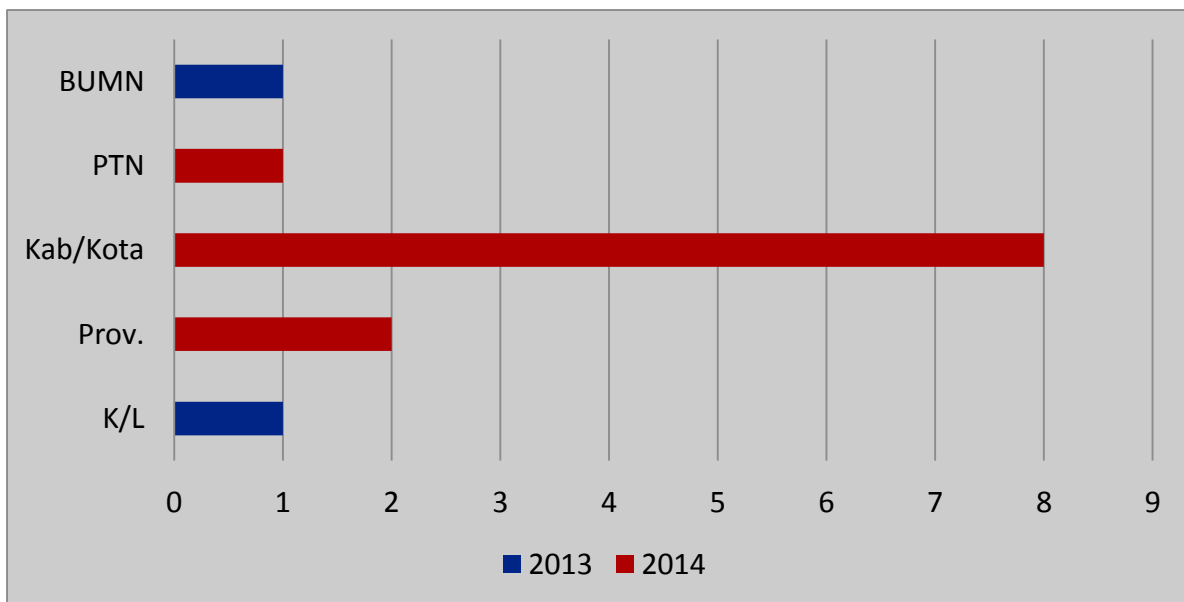
Teknis Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Simpul Jaringan, serta Pedoman Alih Daya Penyimpan Arsip berbasis *Cloud*. Disamping itu juga dilakukan: pengelolaan data informasi untuk penyelenggaraan SIKN dan JIKN, pengelolaan website JIKN, Rapat koordinasi Nasional SIKN dan JIKN, sosialisasi SIKN dan JIKN, Implementasi SIKN dan JIKN, pemeliharaan aplikasi SIKN di pusat Jaringan, serta penyusunan kerangka kerja infrastruktur SIKN. Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN secara nasional, Kepala ANRI telah mengeluarkan surat Nomor IK.00.03/1839A/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Berdasarkan surat tersebut, seluruh pencipta arsip dan lembaga kearsipan dapat menyelenggarakan SIKN dan JIKN. Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2014, lembaga kearsipan dan lembaga lainnya yang menjadi simpul jaringan menjadi sebanyak 11 (sebelas) simpul. Ke 11 (sebelas) simpul tersebut adalah:

Badan Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Unit Arsip IPB, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Aceh, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Banyuasin, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik Pemerintah Kota Cimahi, Kantor Arsip Kabupaten Bantul, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar. Adapun data arsip dinamis dan arsip statis yang *terupload* dalam Jaringan JIKN sebesar 1990 data, dengan rincian jumlah arsip statis yang *terupload* di JIKN sebanyak 1088 arsip dan jumlah arsip dinamis yang *terupload* di JIKN sebanyak 902 arsip. Realisasi sebesar 1990 data yang *terupload* dalam JIKN merupakan pencapaian 100% dari yang ditargetkan. Data arsip statis dan arsip dinamis sebesar 1990 tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:



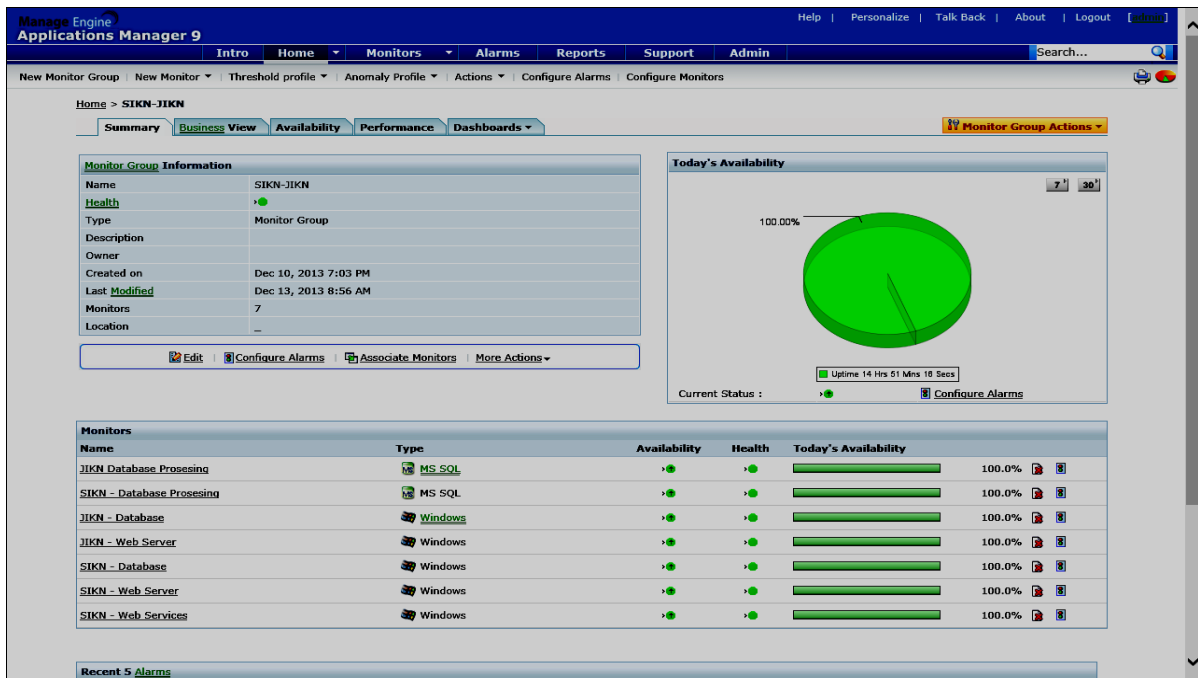
Tabel 5

Perbandingan Jumlah Simpul Jaringan Tahun 2013 dan 2014

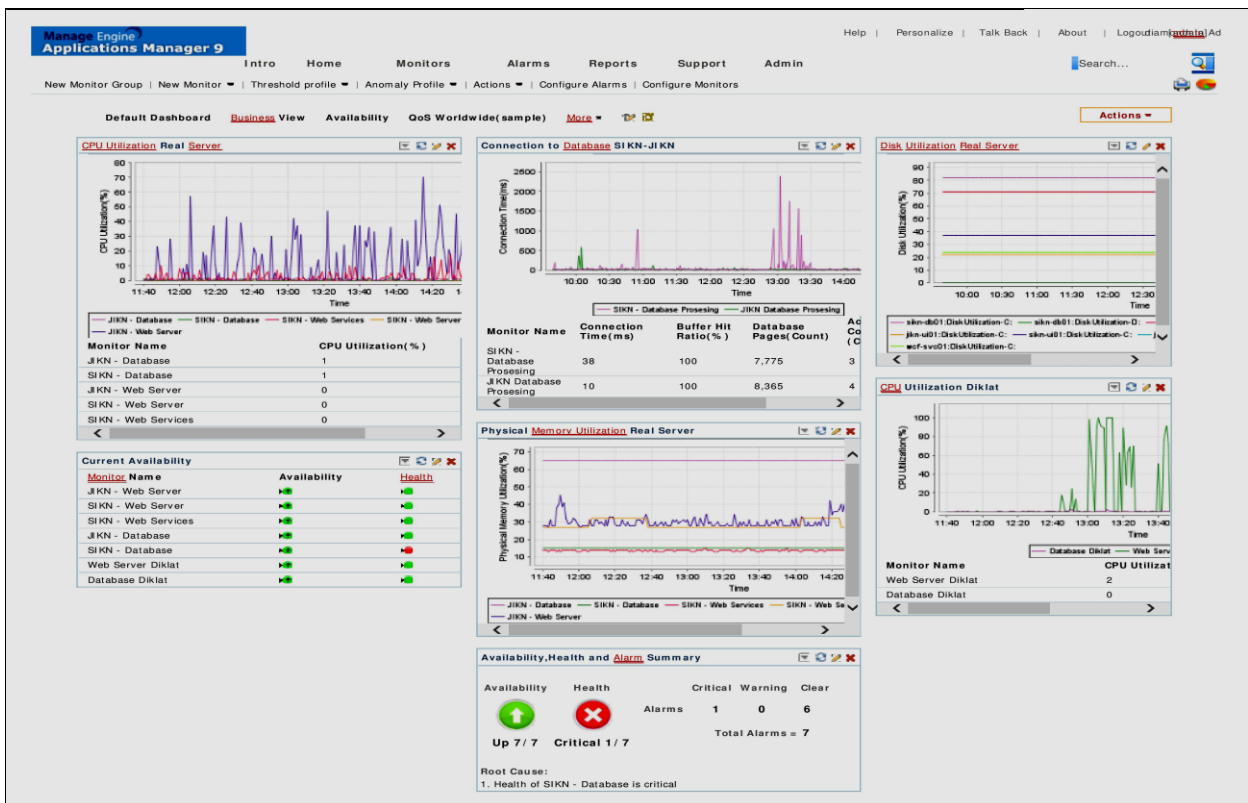


Berikut kami sampaikan gambar beberapa Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau

kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.



Contoh Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional



Contoh Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional

Availability and Health History Report for SIKN-JIKN – Today

Legend	
	Monitor Group

Start date/time	End date/time
27-11-14, 00:00	27-11-14, 15:46

Monitor Group	Outages		Warning/Critical		From	To	Monitor	Message
	Duration	Count	Duration	Count				
SIKN-JIKN			00 : 01 : 12	1	27/11/14 03:18	27/11/14 03:19	SIKN - Database	Health of SIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error].
			00 : 01 : 03	1	27/11/14 03:12	27/11/14 03:13	JIKN - Database	Health of JIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error].
			00 : 01 : 03	1	27/11/14 02:22	27/11/14 02:23	SIKN - Web Services	Health of SIKN - Web Services is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error].
			00 : 01 : 03	1	27/11/14 03:17	27/11/14 03:18	SIKN - Database	Health of SIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error].
			00 : 01 : 03	1	27/11/14 03:12	27/11/14 03:13	JIKN - Database	Health of JIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error].
Total for SIKN-JIKN	00 : 00 : 00	0	00 : 05 : 24	5	-	-	-	Availability 100.0 %

Contoh Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional

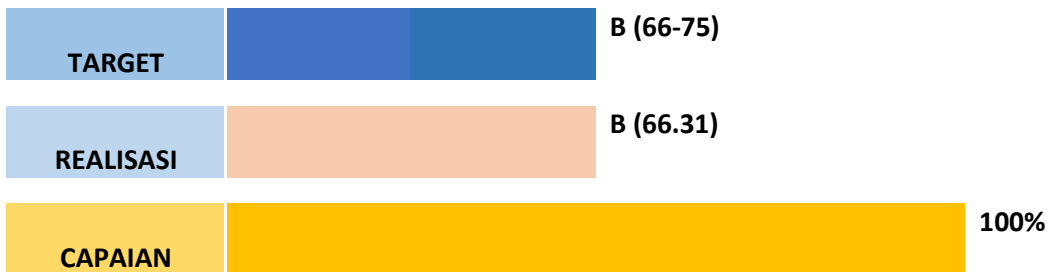


Mewujudkan birokrasi yang moderen di ANRI

Terwujudnya peningkatan utu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel

Pada sasaran strategis ini, tercermin pada 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI



Sebagai kewajiban bagi setiap lembaga dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya, ANRI juga melakukan penyusunan LAKIP yang akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, ANRI pada Tahun 2014 telah menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2013 dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Kepala ANRI Nomor: PR.04.03/393/2014 tanggal 13 Maret 2014.

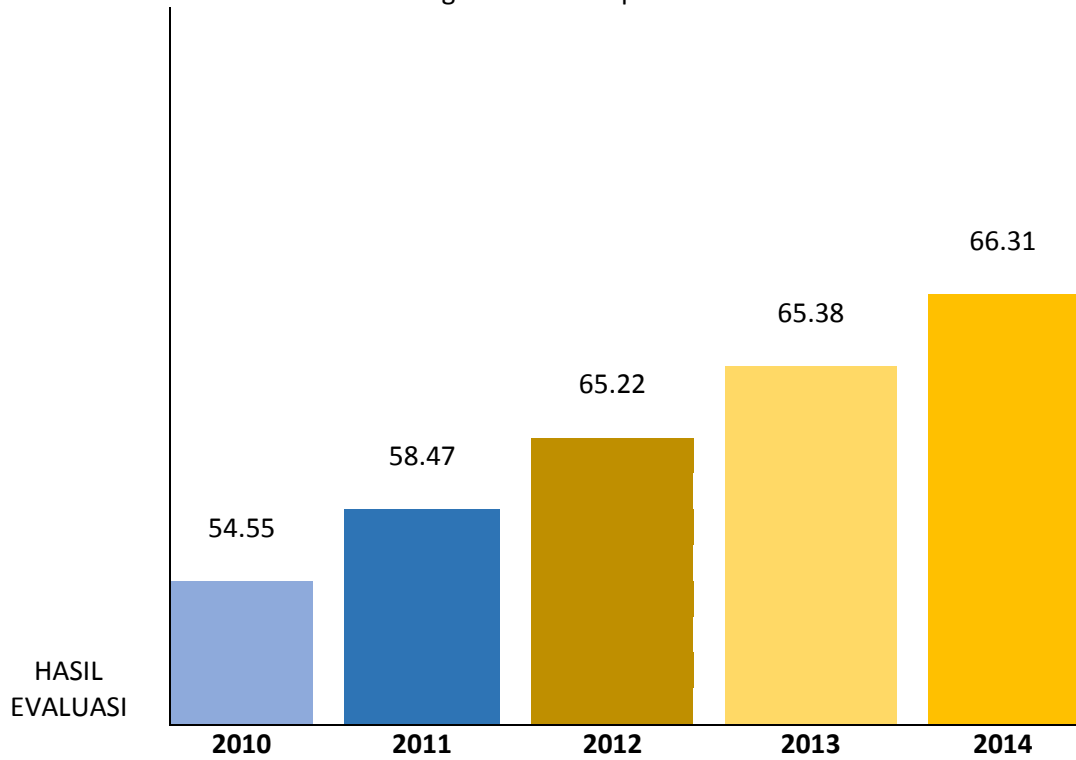
Berdasarkan surat Menteri Negara PAN dan RB nomor : B/2957/M.PAN-RB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ANRI

memperoleh nilai **66.31** atau dengan predikat penilaian “**B**” dengan rincian sebagai berikut :

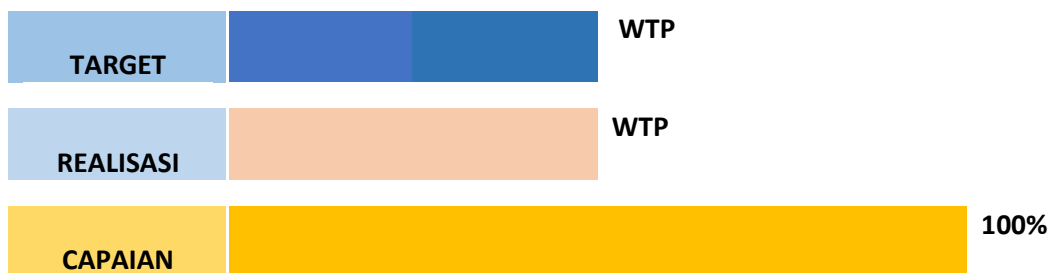
NO	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai 2014
1.	Perencanaan Kinerja	35	22.23
2.	Pengukuran Kinerja	20	12.87
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.80
4.	Evaluasi Kinerja	10	6.54
5.	Capaian Kinerja	20	13.87
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66.31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sebagai gambaran nilai AKIP ANRI, berikut kami sampaikan perbandingan nilai AKIP dari tahun 2010 – 2014.

Tabel 6
Perbandingan Evaluasi Laporan AKIP



1. Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan



Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pada Tahun 2014 ANRI mendapatkan **opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)** dari BPK. Dapat kami sampaikan bahwa dari tahun 2008 secara berturut-turut

sampai dengan tahun 2012, berdasarkan audit dari BPK atas laporan keuangan, ANRI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip



Pada indikator ini, dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung kemudahan dalam layanan arsip telah dilakukan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan ANRI. Adapun pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kearsipan yang telah dilakukan antara lain adalah: terciptanya interkoneksi jaringan di ANRI, Pusdiklat serta terehabilitasinya

sistem dan jaringan, tersedianya peralatan pengolah data yang memadai serta tersedianya sarana dan prasarana perkantoran berupa peralatan dan mesin yang memadai di lingkungan ANRI serta terciptanya ruang sekat pegawai untuk kenyamanan dalam bekerja. Berikut kami sampaikan persentase perbandingan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung layanan arsip.

Tabel 7
Perbandingan Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2013 dan 2014

KATEGORI	TAHUN 2013	TAHUN 2014
Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	90%	100%



KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

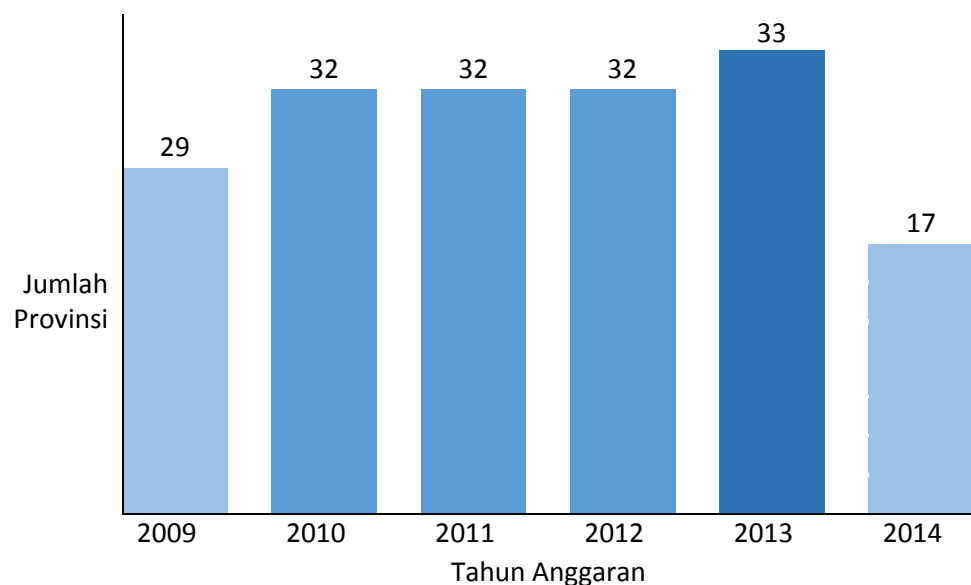
ANRI, disamping melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti telah disebutkan diatas, juga melaporkan kegiatan yang terkait pemberian dana dekonsentrasi ke provinsi yang digunakan untuk peningkatan kemampuan dalam mengelola arsip dengan mengadakan diklat.

Dalam rangka pelaksanaan **“Program Arsip Masuk Desa (AMD)”** yang dicanangkan oleh Presiden RI pada Tahun 2009, ANRI merencanakan penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretraris Desa. Diklat tersebut diselenggarakan oleh lembaga kearsipan daerah provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Pada Tahun 2014 ditargetkan akan dilaksanakan diklat teknis kearsipan melalui

dana dekonsentrasi bagi 17 (tujuh belas) provinsi di Indonesia. Ke-17 (tujuh belas) provinsi tersebut adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan selatana, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Barat dan sulawesi Barat.

Realisasi pelaksanaan dari kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi ini telah terlaksana pada 17 (tujuh belas) provinsi atau tercapai 100%. Berikut kami sampaikan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi:



B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

Pagu anggaran ANRI tahun 2014 sebesar Rp. **Rp.117.043.549.000,-** (seratus tujuh belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi sebesar. **Rp.103.911.372.237,-** (seratus tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluhb dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar **88,78%** dengan rincian per program sebagai berikut:

Realisasi anggaran dan realisasi anggaran per sasaran terkait pencapaian indikator kinerja terdapat pada Lampiran 8.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran Tahun 2013 terdapat

peningkatan penyerapan anggaran dimana pada Tahun 2013 penyerapan anggaran sebesar **88,70%**, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penyerapan anggaran sebesar **88.78%**. Terkait penyerapan anggaran pada tahun 2014 sebesar 88.78% disebabkan oleh:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari perjalanan dinas;
2. Tidak terpenuhinya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Sisa anggaran pada belanja gaji sehingga berakibat anggaran tersebut dikembalikan kepada kas negara.

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	91.387.216.000,-	80.867.967.911,-	88.49%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan	2.580.500.000,-	2.570.935.150,-	99.63%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	23.075.833.000,-	20.472.469.176,-	88.78%
JUMLAH	117.043.549.000,-	103.911.372.237.000,-	88.78%



Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ANRI berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Penetapan Kinerja ANRI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Rencana Strategis (Renstra) ANRI Tahun 2010-2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2014 menampilkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum Arsip Nasional RI telah dapat memenuhi atau sesuai rencana dengan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak seluruh target kinerja dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan. Tidak terealisasinya

target kinerja dalam rangka meningkatkan pembinaan kegiatan kearsipan secara nasional, tidak hanya disebabkan ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan, namun juga diperlukan komitmen, partisipasi dan dukungan aktif dari segenap komponen baik instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta pihak swasta dan perorangan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja ANRI sangat diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga pembangunan di bidang kearsipan akan lebih dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Dukungan dari berbagai pihak harus dapat dilaksanakan secara nyata, tidak hanya merupakan gambaran atau cita-cita semata yang hanya merupakan wacana dan pergulatan pemikiran semata, sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN YANG AKAN DILAKSANAKAN ANRI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi dala penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*;

3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi.
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan,
5. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di bidang kearsipan, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu melakukan koordinasi, peningkatan kerjasama

serta membangun sinergi dengan berbagai pihak baik instansi di pusat, di daerah, pihak swasta dan perorangan.

Arsip Nasional RI



**PENETAPAN KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya				
1	Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif	1.	Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis;	15%
		2.	Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip	15%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya				
1	Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik	1.	Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan	50%
		2.	Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun	25%
Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis teknologi dan informasi (TIK) secara komprehensif dan terpadu				
1	Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan	1.	Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN	10%
Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI				
1	Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang	1.	Skor Lakip ANRI	Nilai B (66-75)
		2.	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	profesional, transparan dan akuntabel	3. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	100%

**PENGUKURAN/CAPAIAN KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
1	Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis;	15%	30 instansi	98
2	Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip	15%	14 instansi	100
3.	Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan	50%	Arsip Pemilu, Arsip KIB, Arsip perbatasan,	110
4.	Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun	25%	75 instansi	154
5.	Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN	10%	11 simpul (1990 data)	100
6.	Skor Lakip ANRI	Nilai B (66-75)	Nilai B (66.31)	100
7.	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	100%	interkoneksi jaringan, rehabilitasi sistem dan jaringan, tersedianya peralatan pengolah data, peralatan dan mesin	100

**DAFTAR INSTANSI
YANG TELAH DILAKUKAN IMPLEMENTASI SIKD-TIK
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

NO	INSTANSI
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
3	Kementerian Lingkungan Hidup RI
4	PT. Jasa Raharja
5	PT. POS Indonesia (Persero)
6	PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Semarang
7	PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar
8	PT. Pengembangan Pariwisata Bali
9	Badan Pusat Statistik
10	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
11	Lembaga Kebijakan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
12	Kementerian Sosial RI
13	BP Batam
14	Universitas Sriwijaya
15	Universitas Trunojoyo
16	Provinsi Aceh
17	Provinsi Sumatera Utara
18	Provinsi Sumatera Barat
19	Provinsi Riau
20	Provinsi Kepulauan Riau
21	Provinsi Bengkulu
22	Provinsi Banten
23	Provinsi DKI Jakarta
24	Provinsi Jawa Timur
25	Provinsi Jawa Tengah
26	Provinsi Kalimantan Barat
27	Provinsi Kalimantan Selatan
28	Provinsi Gorontalo
29	Provinsi Sulawesi Tenggara
30	Provinsi Nusa Tenggara Barat
31	Universitas Udayana
32	Kementerian Luar Negeri RI

INSTANSI PUSAT YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI KAIDAH KEARSIPAN

NO	INSTANSI
1	YPAI AL Azhar
2	PB. Nahdatul Ulama
3	PT. Timah (Persero)
4	PT. Semen Baturaja (Persero)
5	PT. Jasa Tirta I (Persero)
6	DPP Partai Amanat Nasional
7	DPP Golongan Karya
8	PT. Pertamina (Persero)
9	PT. Taspen (Persero)
10	PT. Semen Padang (Persero)
11	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12	PT. Pharos (Persero)
13	PT. Perkebunan Nusantara VII- Lampung
14	PT. Semen Bosowa (Persero)

**DAFTAR INSTANSI YANG MENYERAHKAN ARSIP STATIS
PADA TAHUN 2014**

No	INSTANSI	JENIS ARSIP	JUMLAH
1	Kementerian Kehutanan	- Batas Hutan Timor - Kelembagaan	47 Box
2	Kementerian Hukum dan HAM	- Peraturan Undang-Undang - Komisi HAM	11 Box
3	Kementerian Perumahan Rakyat	Pengembangan perumahan, perumahan swadaya, perumahan formal	30 Box
4	Kementerian Sekretariat Negara	Pidato Ibu Tin Soeharto	41 Box
5	Sekretariat Kabinet	- KEPRES - Penetapan Golongan IV/c keatas	650 Box
6	Kementerian Keuangan	- Nota Keuangan dan RAPBN - SK Menteri 1968 - 2011	9 Box, 225 berkas
7	Kementerian Luar Negeri	- Ditjen Multilateral - Amerop : Eropa Timur, Eropa Tengah - Arsip Keuangan	1 Box
8	BAWASLU	- MOU dengan berbagai lembaga - Sejarah pengawasan pemilu - Laporan akhir tahun 2013	3 Box
9	DKPP	- Putusan perkara KPU - Pelantikan anggota DKPP	1 Box
10	Badan Pelaksana BPLS	Perencanaan hokum ortala	6 Box
11	ANRI	- MOU ANRI dengan NAM - Notulen rapat sejarah lisan - Berkas kumpulan synopsis - Laporan keuangan	2 Box
12	LIPI	Kebun Raya Cibodas	1 Box
13	BATAN	Nuklir di bidang pertanian, peternakan, dan sejarah organisasi BATAN	13 Berkas
			3 Film Dokumenter
			Total: 4 Box
14	BPKP	- Laporan hasil pengawasan - LAKIP - Kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Delegasi Luar Negeri	2 Box

		- MOU dengan Menteri	
15	MKRI	- PHPU - PUU	524 Box
16	BIG	- Peta perbatasan Indonesia – Singapura	4 Box
			9 Jilid
		- Atlas actual (peta Braille)	2 Peta
		- MOU	
17	Lemhanas	Buku merah tentang G30SPKI, Gerwani	70 Box
18	KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal	Arsip Pilpres Tahun 2009	1 Box
		Arsip Pileg Tahun 2009	
19	Dewan Pertimbangan Presiden	Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, agama, dll	4 Box
20	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Penyerahan arsip sertifikat pengakuan lembaga internasional UNESCO PBB berupa sertifikat pengakuan Tari Saman dan Noken Papua	2 Sertifikat
21	Kementerian Luar Negeri RI	Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, agama dll	1 Box
22	Kementerian Kesehatan RI	Surat Pengunduran diri menteri Endang, berkan memori masukan DPR-RI dari Kementerian Kesehatan	4 Berkas
23	BPLS Sidoarjo	Laporan penting kejadian meletus dan foto citra satelit secara kronologis	55 Berkas
24	Otorita Asahan	Contract kerja dengan jepang dan berbagai kegiatan power station bundungan	69 Box
25	Sekretariat Kabinet	Kenaikan pangkat golongan gol IVc Keatas dan peraturan undang- undang 2007-2012	81 dan 357 box
26	Sekretariat Militer Presiden/Sekneg	Memorial Presiden SBY	500 Jilid
27	ANRI	Undang-undang dan perencanaan	14 box
JUMLAH			1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat

PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP TAHUN 2014

NO	NOMOR	URAIAN ISI INFORMASI	INSTANSI
1	PK.03.09/63/2014	JRA fasilitas non keuangan dan non kepegawaian PDAM	Kabupaten Gianyar
2	PK.03.09/62/2014	JRA fasilitatif bidang keuangan, kepegawaian ASN dan pejabat negara dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	MPR RI
3	PK.03.09/61/2014	JRA substantif	Dirjen Anggaran dan Badan Kebijakan Kiskal Kementerian Keuangan
4	PK.03.09/60/2014	JRA substantif	Kementerian Perhubungan
5	PK.03.09/59/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Pemerintah Kabupaten Purworejo
6	PK.03.09/58/2014	JRA fasilitatif keuangan dan fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7	PK.03.09/57/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara, serta fasilitatif keuangan	Pemerintah Kabupaten Pohuwato
8	PK.03.09/56/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara, serta fasilitatif keuangan	Pemerintah Kabupaten Boalemo
9	PK.03.09/55/2014	JRA fasilitatif keuangan	Pemerintah Kabupaten Solok
10	PK.03.09/54/2014	JRA fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara	Pemerintah Kabupaten Sambas
11	PK.03.09/53/2014	persetujuan JRA fasilitatif kepegawaian	Provinsi Banten
12	PK.03.09/52/2014	persetujuan JRA keuangan kabupaten magelang	
13	PK.03.09/51/2014	Persetujuan JRA fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara dan fasilitatif keuangan PDAM	Kabupaten Gianyar
14	PK.03.09/50/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Pemerintah Provinsi Jambi
15	PK.03.09/49/2014	JRA fasilitatif keuangan	Pemerintah Aceh
16	PK.03.09/48/2014	JRA fasilitatif keuangan dan fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara	Pemerintah Kabupaten Berau
17	PK.03.09/47/2014	JRA fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian pemerintah	Kabupaten Magetan

NO	NOMOR	URAIAN ISI INFORMASI	INSTANSI
18	PK.03.09/46/2014	JRA fasilitatif kepegawaian dan keuangan	Poltek Negeri Semarang
19	PK.03.09/45/2014	JRA fasilitatif kepegawaian pegawai ASN dan pejabat negara	Pemerintah Kabupaten Bangli
20	PK.03.09/44/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara, serta JRA fasilitatif keuangan	Pemerintah Provinsi Gorontalo
21	PK.03.09/43/2014	JRA fasilitatif keuangan serta fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara	Pemerintah Kota Balikpapan
22	PK.03.09/42/2014	JRA fasilitatif keuangan	Pemkab Murung Raya
23	PK.03.09/41/2014	JRA substantif	Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
24	PK.03.09/40/2014	JRA fasilitatif kepegawaian PNS dan Pejabat Negara, serta fasilitatif keuangan	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
25	PK.03.09/39/2014	JRA fasilitatif keuangan	Pemerintah Kabupaten Nunukan
26	PK.03.09/37/2014	JRA fasilitatif asn dan pejabat negara dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Kabupaten Belitung
27	PK.03.09/36/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Pemerintah Kabupaten Wajo
28	PK.03.09/35/2014	JRA fasilitatif bidang keuangan, kepegawaian dan non keuangan dan non kepegawaian	
29	PK.03.09/34/2014	JRA Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Keuangan	Pemerintah Kota Gorontalo
30	PK.03.09/33/2014	JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian ASN dan Pegawai Negara	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
31	PK.03.09/32/2014	JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah	Kabupaten Bantul
32	PK.03.09/31/2014	JRA Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara	Pemerintah Kabupaten Bulungan
33	PK.03.09/28/2014	Persetujuan JRA Fasilitatif Bidang Keuangan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
34	PK.03.09/27/2014	JRA fasilitatif kepegawaian ASN dan keuangan	BMKG
35	PK.03.09/26/2014	JRA fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara	Kemenko Bidang Polhukam
36	PK.03.09/25/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Kementerian Pertahanan
37	PK.03.09/24/2014	JRA substantif KemenPAN dan RB	

NO	NOMOR	URAIAN ISI INFORMASI	INSTANSI
38	PK.03.09/23/2014	JRA substantif dan fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara	Ombudsman RI
39	PK.03.09/22/2014	JRA fasilitatif kepegawaian, keuangan non keuangan dan non kepegawaian dan JRA substantif	Kemenlu RI
40	PK.03.09/20/2014	JRA Fasilitatif	Pemkot medan
41	PK.03.09/19/2014	JRA Fasilitatif	Kementerian Dalam Negeri
42	PK.03.09/18/2014	JRA Keuangan	Kabupaten Paser
43	PK.03.09/17/2014	JRA fasilitatif bidang penelitian dan pengembangan	Badan Pertanahan Nasional
44	PK.03.09/16/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Pemkab Pacitan
45	PK.03.09/15/2014	Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS ,polri dan TNI	
46	PK.03.09/14/2014	Persetujuan JRA substantif	Kemenko Kesra
47	PK.03.09/13/2014	Persetujuan JRA substantif ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
48	PK.03.09/12/2014	JRA substantif	Kementerian Kehutanan
49	PK.03.09/11/2014	Persetujuan JRA substantif	BNPB
50	PK.03.09/10/2014	Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara	Pemkab Sijunjung
51	PK.03.09/09/2014	Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara	Pemkab Cianjur
52	PK.03.09/08/2014	Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara	Pemkab Bangka Selatan
53	PK.03.09/07/2014	Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara	Pemkab Sleman
54	PK.03.09/06/2014	Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara	Pemkab Solok
55	PK.03.09/05/2014	JRA Substantif dan Fasilitatif	BAWASLU dan DKPP
56	PK.03.09/04/2014	Permohonan persetujuan JRA kepegawaian, keuangan, fasilitatif non keuangandan non kepegawaian dan JRA	Universitas Semarang
57	PK.03.09/03/2014	JRA fasilitatif dan Substantif	PPATK
58	PK.03.09/02/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian JRA kepegawaian, JRA keuangan dan JRA substantif	BPN
59	PK.03.09/01/2014	JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ARSIP

NO	INSTANSI (JENIS INFORMASI)
1	PT.Timah Jakarta
2	PT Angkasa Pura I kantor kantor pusat
3	Kementerian Kehutanan
4	KPPBC tipe B Batam
5	Kementerian Keuangan
6	Kementerian Pertanian
7	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
8	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI
9	KPPN Bukittinggi
10	Kantor pusat DJBC
11	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
12	KPPN Baturaja
13	Kabupaten Bandung
14	PT Angkasa Pura I
15	Kementerian Pertahanan dan TNI
16	Kementerian Perindustrian RI
17	Kabupaten Belitung Timur (arsip logistiks eks pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009)
18	Kabupaten Kepahiang (arsip eks pemilu tahun 2009)
19	Eks pemilukada Kabupaten Pati (persetujuan pemusnahan arsip eks pemilu tahun 2009)
20	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Provinsi Sulawesi Tengah
21	Eks Bagian Keuangan Setwilda tingkat II Purworejo (arsip keuangan)
22	KPPN Gorontalo
23	PPA Pemkot Medan
24	Daerah Istimewa Yogyakarta
25	PPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
26	Lembaga Admistrasi Negara RI
27	KPPBC TMP B Jambi
28	KPPBC TMP Merak
29	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
30	KPPN Pekanbaru
31	BKN (arsip kepegawaian)
32	KPPBC TMP A Bekasi
33	Badan Pusat Statistik
34	PDAM Kabupaten Ngawi
35	Unit Kearsipan II (Itjen) Kementerian Perindustrian
36	Pemerintah Daerah Provinsi Bali
37	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
38	LAPAN
39	Kanwil DJP Jakarta khusus
40	Kementerian Keuangan (Purwakarta)
41	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin
42	PPA DJBC Bali, NTB dan NTT
43	PPA KPU Kab. Landak
44	PPA KPPN Kotabaru

NO	INSTANSI (JENIS INFORMASI)
45	PPA KPP Pratama Jakarta Jatinegara
46	Persetujuan Pemusnahan Arsip BPS
47	PPA Kementerian Perhubungan RI
48	PPA Kementerian Sekretariat Negara RI
49	PPA KPPBC TMP B Samarinda
50	KPPBC TMP Tanjung Emas
51	PPA KPU provinsi kepulauan Bangka Belitung
52	PPA KPU kabupaten Gowa
53	Eks Kanwil Departemen Penerangan dan Eks BP 7 Provinsi Sumatera BARat
54	Arsip Universitas Airlangga
55	PPA dokumen PT Bukit Asam
56	PPA KPKNL Purwokerto
57	KPPBC Sibolga
58	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
59	Kemenkeu RI
60	BPJS jakarta
61	Persetujuan pemusnahan Arsip kemenlu RI
62	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
63	Kabupaten Badung
64	Dirjen BPDAS PS
65	Badan linformasi Geospacial
66	Dirjen perbendaharaan provinsi Jawa Barat
67	KPP PMA Satu
68	KPPBC TMP C Lhokseumawe
69	KPPN Gunung sitoli
70	KPU Kab Ciamis
71	KPP Madya Sidoarjo
72	Persetujuan pemusnahan arsip KPPN II Medan
73	Pertimbangan Pemusnahan Arsip PT Angkasa Pura I
74	Eks. Kanwil Departemen Penerangan dan Eks. BP 7 Provinsi Sumatera Barat
75	Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

**REALISASI ANGGARAN TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)	
Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif	Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis;	2,208,296,000	2,155,691,600	98
		Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip	751,052,000	725,341,000	97
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya					
1	Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan	Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan	1,519,172,000	1,470,860,800	97
		Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun	609,372,000	602,024,200	99
Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis teknologi dan informasi (TIK) secara komprehensif dan terpadu					

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)
1	Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan	Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN	1,607,683,000	1,560,649,200	98
Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI					
1	Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel	Skor Lakip ANRI	1,542,170,000	1,536,213,600	100
		Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	383,760,000	364,434,600	95
		Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	2,580,500,000	2,570,935,150	100

**PENYELAMATAN ARSIP STATIS LEMBAGA NEGARA
TAHUN 2014**

No	Nama Instansi	Jenis Arsip	Jumlah
1	Kementerian Kehutanan	- Batas Hutan Timor Timur - Kelembagaan	47 Box
2	Kementerian Hukum dan HAM	- Peraturan Undang-Undang - Komisi HAM	11 Box
3	Kementerian Perumahan Rakyat	Pengembangan perumahan, perumahan swadaya, perumahan formal	30 Box
4	Kementerian Sekretariat Negara	Pidato Ibu Tin Soeharto	41 Box
5	Sekretariat Kabinet	- KEPRES Penetapan Golongan IV/c keatas	650 Box
6	Kementerian Keuangan	- Nota Keuangan dan RAPBN - SK Menteri 1968 – 2011	9 Box, 225 berkas
7	Kementerian Luar Negeri	- Ditjen Multilateral - Amerop : Eropa Timur, Eropa Tengah - Arsip Keuangan	1 Box
8	BAWASLU	- MOU dengan berbagai lembaga - Sejarah pengawasan pemilu - Laporan akhir tahun 2013	3 Box
9	DKPP	- Putusan perkara KPU - Pelantikan anggota DKPP	1 Box
10	Badan Pelaksana BPLS	Perencanaan hokum ortala	6 Box
11	ANRI	- MOU ANRI dengan NAM - Notulen rapat sejarah lisan - kumpulan synopsis - Laporan keuangan	2 Box
12	LIPI	Kebun Raya Cibodas	1 Box
13	BATAN	Nuklir di bidang pertanian, peternakan, dan sejarah organisasi BATAN	13 Berkas 3 Film Dokumenter Total: 4 Box
14	BPKP	- Laporan hasil pengawasan - LAKIP - Kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Delegasi Luar Negeri - MOU dengan Menteri	2 Box
15	MKRI	- PHPU - PUU	524 Box
16	BIG	- Petaperbatasan Indonesia – Singapura - Atlas actual (peta Braille) - MOU	4 Box, 9 jilid 2 Peta
17	Lemhanas	Buku merah tentang G30SPKI, Gerwani	70 Box
18	KPU Provinsi Kepulauan Riau	Arsip Pilpres Tahun 2009 Arsip Pileg Tahun 2009	1 Box

No	Nama Instansi	Jenis Arsip	Jumlah
19	Dewan Pertimbangan Presiden	Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, agama dll	4 Box
20	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Penyerahan arsip sertifikat pengakuan lembaga internasional UNESCO PBB berupa sertifikat pengakuan Tari Saman dan Noken Papua	2 Sertifikat
21	Kementerian Luar Negeri RI	Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan,	1 Box
22	Kementerian Kesehatan RI	Surat Pengunduran diri menteri Endang, berkan memori masukan DPR-RI dari Kementerian Kesehatan	4 Berkas
23	BPLS Sidoarjo	Laporan penting kejadian meletus dan foto citra satelit secara kronologis	55 Berkas
24	Otorita Asahan	Contract kerja dengan jepang dan berbagai kegiatan power station bendungan	69 Box
25	Sekretariat Kabinet	Kenaikan pangkat golongan gol IVc Keatas dan peraturan undang-undang 2007-2012	81 dan 357 box
26	Sekretariat Militer Presiden/Sekneg	Memorial Presiden SBY	500 Jilid
27	ANRI	Undang-undang dan perencanaan	14 box
JUMLAH			1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat

**PENYELAMATAN ARSIP STATIS (NON LEMBAGA NEGARA)
TAHUN 2014**

NO	KETERANGAN	INSTITUSI/JUMLAH
1	Arsip perusahaan	PT. Askes (22 boks arsip), Balai Pustaka (1 boks arsip), PT. Taspen (14 boks arsip), PT. Pelindo III Surabaya (22 boks arsip), PT. Angkasa Pura I (20 boks arsip)
2	Arsip Ormas/Orpol	PBNU (15 boks), PMI (25 boks), PP Muhammadiyah (11 boks), Partai Golongan Karya,
3	Arsip perorangan (tokoh nasional/pelaku sejarah)	Pandam Guritno, Kris Biantoro, Henk Ngantung
4	Wawancara dengan kerabat kerajaan serta tokoh pembentukan dan pemekaran wilayah serta konflik di daerah	30 kaset

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif	1.	Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis;	15%	32 instansi	103	
		2.	Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip	15%	14	94	
1	Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik	1.	Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan	50%	Arsip Pemilu, Arsip KIB, Arsip Perbatasan	110	
		2.	Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun	25%	77 instansi	154	
2	Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan	1.	Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN	10%	11 simpul (1990 data)	100	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
3	Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel	1. Skor Lakip ANRI	Nilai B (66-75)	B (66.31)	100	
		2. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	
		3. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana	100	
CAPAIAN SASARAN					107.625	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PPK)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1.	Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis;	Input : Dana, SDM	Rp 2,208,296,000	Rp 2,155,691,600	98
			Output: implementasi SIKD	30 instansi	32 instansi	103
			Outcomes:	15%	32 Instansi	103
	2.	Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip	Input : Dana, SDM	Rp 751,052,000	Rp 725,341,000	97
			Output:	15 instansi	14 instansi	98
			Outcomes:	15%	14 instansi	98
Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik	1.	Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan	Input : Dana, SDM	Rp 1,519,172,000	Rp 1,470,860,800	97
			Output:	25 instansi	27 instansi	110
			Outcomes:	50%	Arsip Pemilu, Arsip KIB, Arsip perbatasan	110
	2.	Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan	Input : Dana, SDM	Rp 609,372,000	602,024,200	99

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
		pemusnahan arsip per tahun				
			Output:	50 instansi	77 instansi	154
			Outcomes:	25%	77 instansi	154
Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan	1.	Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN	Input : Dana, SDM	Rp 1,607,683,000	Rp 1,560,649,200	98
			Output:	11 simpul	11 simpul	100
			Outcomes:	10%	11 simpul (1990 data)	100
Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel	1.	Skor Lakip ANRI	Input : Dana, SDM	Rp 1,542,170,000	Rp 1,536,213,600	100
			Output:	1 Laporan AKIP	1 Laporan	100
			Outcomes:	Nilai B (66-75)	B (66.31)	100
	2.	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Input : Dana, SDM	Rp 383,760,000	Rp 364,434,600	95
			Output:	3 dokumen	3 dokumen	100

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
		Outcomes:	WTP	WTP	100	
	3. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	Input : Dana, SDM	Rp 2,580,500,000	Rp 2,570,935,150	100	
		Output:	5 pengadaan sarana prasarana	5 dokumen100	100	
		Outcomes:	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana	100	
JUMLAH		Input	Rp 11,202,005,000	10,986,150,150	98	
		Output	99.50%			
		Outcomes:	107%			

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif	Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis;	98	103	1	1	Efisien	0
	Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip	97	94	1	1	Efisien	0

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik	Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan	97	110	1	1	Efisien	0
	Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun	99	154	2	1	Efisien	1
Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis teknologi dan informasi (TIK) secara komprehensif dan terpadu	Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN	98	100	1	1	Efisien	0
Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI	Skor Lakip ANRI	100	100	1	1	Efisien	0
	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	95	100	1	1	Efisien	0

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip	100	100	1	1	Efisen	0